



Analisis Window of Opportunity dalam Kebijakan Pengetatan Imigrasi Italia di bawah Kepemimpinan Giorgia Meloni 2022-2024

Ilona Izdihar Putri Welmianti¹⁾, Muhammad Ardimas Jaya Syahputra²⁾,
Arnold Bobby Rahman Tikho³⁾, Renitha Dwi Hapsari⁴⁾

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

22044010186@student.upnjatim.ac.id¹⁾

22044010150@student.upnjatim.ac.id²⁾

22044010039@student.upnjatim.ac.id³⁾

Abstrak

Dalam beberapa dekade terakhir, Italia menghadapi krisis imigrasi, terutama membludaknya imigran dari Afrika dan Timur Tengah. Sebagai negara yang menjadi titik utama masuknya migran, pemerintah Italia merespons melalui serangkaian kebijakan anti-imigrasi. Artikel ini menganalisis pengambilan kebijakan imigrasi Italia dengan menggunakan teori *Window of Opportunity* oleh Joakim Eidenfalk. Penelitian dilakukan melalui metode kualitatif dengan studi literatur akademik, media massa, dan data statistik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Italia bersifat ambivalen: berhasil menahan sebagian arus migrasi dan mendapat dukungan politik domestik, namun menuai kontroversi karena menimbulkan persoalan hak asasi manusia dan keterikatan Italia terhadap hukum internasional. Dengan demikian, penerapan teori *Window of Opportunity* dapat membantu memahami dinamika tuntutan, dukungan, sumber daya, dan kendala yang membentuk keputusan kebijakan Italia.

Kata kunci: Italia, kebijakan anti-imigrasi, *Window of Opportunity*

Abstract

In recent decades, Italy has faced an immigration crisis, particularly the surge of immigrants from Africa and the Middle East. As a major point of entry for migrants, the Italian government has responded through a series of anti-immigration policies. This article analyzes Italian immigration policymaking using Joakim Eidenfalk's Window of Opportunity theory. The research was conducted using qualitative methods, including a study of academic literature, mass media, and statistical data. The findings indicate that Italy's policies are ambivalent: they have succeeded in partially stemming migration flows and garnered domestic political support, but have generated controversy due to human rights issues and Italy's adherence to international law. Therefore, applying the Window of Opportunity theory can help understand the dynamics of demands, support, resources, and constraints that shape Italian policy decisions.

Key words: Italy, anti-immigration policy, *Window of Opportunity*

PENDAHULUAN

Italia sebagai negara di Eropa Selatan menjadi salah satu tujuan masuk maupun transit bagi para imigran Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia untuk menuju negara-negara Eropa Barat, maupun Britania Raya. Hal ini menyebabkan Italia menghadapi tantangan dalam menangani kasus imigrasi yang disebabkan oleh jumlah imigran yang membludak dan seringkali

melibatkan imigran ilegal yang melebihi kapasitas penanganan masuk ke Italia (Sinaga, 2025, 1136-1138). Sebelumnya masyarakat Eropa telah terlibat dalam diskusi mengenai migrasi yang semakin intensif. Fenomena masuknya imigran ke dalam Italia sudah bertahun-tahun lamanya. Pada tahun 2015 kedatangan mereka ke Italia berkisar 153.842, dan di tahun 2016 terjadi kenaikan dengan jumlah 181.436 (European Council On Foreign Relations, 2018).

Organisasi Uni Eropa (U.E) berupaya untuk menerima banyak imigran dengan pembuatan kebijakan-kebijakan imigrasi yang lebih terbuka namun usaha tersebut belum menyelesaikan krisis yang dialami dengan Italia, sehingga mendorong Italia untuk berjalan sendiri. Ketidakstabilan politik dan sosial Afrika Utara dan Timur Tengah menambah banyak warga negara yang terdampak konflik melakukan migrasi untuk mencari keselamatan dan peruntungan di wilayah lain, Imigran seperti Suriah, Libya, Chad hingga Afghanistan memberanikan diri untuk menyebrang Laut Mediterania dan melalui jalur darat Balkan untuk menuju Italia untuk mencari suaka.

Isu imigran menjadi topik yang ramai diperbincangkan dalam negeri mengingat sebagian perekonomian Italia memerlukan pekerja migran untuk mengisi kekosongan domestik (Armellini et al., 2025). Namun, terdapat kelompok partai politik tertentu yang menggunakan isu imigran ini sebagai ancaman keamanan dalam negeri, hal tersebut dilatarbelakangi dari perbedaan identitas, tingkat perekonomian yang timpang sehingga mendorong tindakan kriminalitas dari para imigran. Perilaku tersebut menimbulkan adanya ketidakamanan dari kalangan masyarakat terhadap para imigran (Elia et al., 2019)

Pada tahun 2022 Italia sedang mengalami gejolak politik dalam negeri, dimana koalisi partai sayap kanan di bawah kepemimpinan Giorgia Meloni memenangkan pemilu dan mencari cara untuk dapat merubah peraturan yang dapat meningkatkan keamanan perbatasan untuk mengontrol isu imigrasi dan regulasi pekerja migran yang masuk kedalam Italia. Dengan kepemimpinan baru dan juga situasi politik global yang tidak stabil, diperlukan suatu peristiwa yang mampu untuk mengubah adanya regulasi Italia. Seperti Cutro Decree, yang menetapkan peraturan izin tinggal, peningkatan kuota imigran secara legal dan penindakan lebih ketat terhadap imigran ilegal.

METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk meneliti suatu objek dengan teknik analisis data bersifat kualitatif dan hasil dari penelitian ini akan lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013, 7-9). Penelitian deskriptif membutuhkan data dan pemahaman yang jelas tentang fenomena yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan berupa studi literatur. Menggunakan teknik tersebut dengan mengumpulkan data sekunder berupa berita, buku, jurnal, artikel, hingga web resmi. Selain itu, dari penelitian yang penulis kerjakan, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan kebijakan yang dibuat oleh Giorgia Meloni dalam menangani migrasi yang masuk ke dalam Italia. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran yang objektif dan terperinci tentang kondisi yang sebenarnya dari suatu objek penelitian. Tujuan dari analisis data kualitatif untuk menyajikan penjelasan yang lebih sistematis dan realistis yang digunakan dalam penelitian melalui studi literatur pada fenomena yang akan diteliti (Creswell, 2014, 3-4).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Domestik

Peran domestik Pertama dalam kasus ini adalah birokrasi Italia yang terdiri dari lembaga pemerintahan dari lokal hingga nasional yang dikepalai oleh Giorgia Meloni sebagai Perdana Menteri. Arah kebijakan yang memperketat imigrasi dan perluasan pusat penahanan menjadi prioritas utama pemerintahan Italia. Perancangan kebijakan tersebut kemudian menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri yang dikepalai oleh Matteo Piantedosi. Pemilihan Matteo

Piantedosi sendiri didasari oleh latar belakangnya yang merupakan pegawai negeri yang berpengalaman dan sekutu dekat dari Partai Liga, partai koalisi pendukung Giorgia Meloni yang dikepalai Matteo Salvini sebagai Wakil Perdana Menteri (ANSA & Info Migrants, 2022). Sejak diangkat menjadi kepala Kementerian Dalam Negeri, Matteo Piantedosi mengesahkan berbagai undang-undang seperti *Piantedosi Decree* yang mempersulit pengangkutan imigran menggunakan kapal organisasi non pemerintahan dengan membatasi tempat persinggahan kapal dan pemberian denda kepada kapal yang menolong imigran di mediterania tengah (Skenderoglou, 2023). Selanjutnya, *Cutro Decree* yang memperketat persyaratan untuk dapat mendapatkan izin tinggal, perlindungan suaka di Italia dan peningkatan hukuman kepada pelaku penyelundupan imigran (Autin, 2023).

Selanjutnya terdapat kelompok partai politik haluan sayap kanan di Italia yang memiliki andil dalam mendukung perubahan kebijakan pengetatan imigrasi. Pada masa pemilihan umum 2022 Koalisi Partai Sayap Kanan memenangkan pemilu dengan total 44% kursi di dewan perwakilan dan Senat. Kemenangan Koalisi ini dipimpin oleh partai sayap kanan populis *Fratelli d'Italia* pimpinan Giorgia Meloni, Partai *Liga* pimpinan Matteo Salvini, dan *Forza Italia* pimpinan Silvio Berlusconi (Kirby, 2022). Pandangan ideologi nativisme dari *Fratelli d'Italia* memposisikan keberagaman dan perubahan sebagai ancaman, sehingga menimbulkan kebencian terhadap etnis minoritas terutama bagi mereka yang berasal dari Afrika Utara atau Timur Tengah dan melabelinya sebagai orang asing. Sehingga, isu imigrasi bukanlah terpusat pada perpindahan imigran tetapi keberagaman akibat imigrasi yang mengancam Italia. Pandangan yang melihat orang asing sebagai ancaman inilah mendukung peningkatan kebijakan yang lebih represif (Marino, 2025).

Adapun kelompok kepentingan memiliki peran untuk menyuarakan perubahan kebijakan imigrasi adalah perserikatan pekerja pabrik dan jasa terbesar di Italia *Confindustria*, serikat kerja agrikultur *Coldiretti*, serta *CGIL* selaku serikat buruh terbesar dan tertua di Italia. Kelompok ini menekankan pentingnya pekerja migran untuk mengisi kekurangan sumber daya di sektor agrikultur, industri dan jasa Italia sehingga mendukung kebijakan imigrasi *Flow Decree* yang meningkatkan kuota pekerja imigran yang masuk ke Italia. Di bawah kepemimpinan Meloni kebijakan *Flow Decree* mendapatkan peningkatan kuota sebanyak 450.000 untuk imigran non EU dalam jangka waktu 3 tahun secara legal (Amante et al., 2025). Meskipun demikian, fokus yang diberikan dari dukungan kebijakan adalah pada efisiensi pelayanan perizinan dan sistem baru yang dapat mengubah kemudahan perizinan imigran yang masuk agar tepat sasaran terhadap permintaan pekerja yang ada di sektor-sektor terdampak (AFP, 2025). Bahwa di antara sekian faktor-faktor, kelompok kepentingan

Peran media-media juga memberikan dampak yang cukup signifikan dalam memberitakan kondisi krisis imigrasi yang terjadi. Sebelumnya, pada tahun 2015 hingga 2016 ketika krisis migran terjadi di Eropa, media Italia memiliki andil besar dalam membentuk opini publik Italia dengan pemberitaan yang mengandung nuansa membahayakan mengenai kedatangan imigran (Matera, 2017, 47-51). Mengutip data dari ANSA selaku kantor berita yang dimiliki Asosiasi Kantor Berita Italia, terdapat upaya untuk meregulasi pemberitaan mengenai imigran di dalam media Italia, hal tersebut menurunkan jumlah pemberitaan tentang imigran secara nasional, pada tahun 2024 terdapat penurunan sebesar 42% terhadap pembahasan isu imigrasi dalam jangka waktu satu tahun, secara total, media Italia menghasilkan 4,500 *headline* seputar imigrasi dimana hal ini menurun sebesar 34% dari tahun 2023. Media seperti *Avvenire* yang terafiliasi dengan gereja katolik menjadi media yang mempublikasi berita paling banyak dengan 254 artikel pada halaman depan dan total 870 halaman. Antara 2013 hingga 2024 terdapat sedikit korelasi antara jumlah imigran yang datang ke Italia dengan pemberitaan media, hal ini menunjukkan bahwa pemberitaan media tidak bergantung pada tekanan migrasi yang nyata di lapangan, meskipun demikian pemberitaan tentang imigran masih bernada negatif (ANSA, 2024).

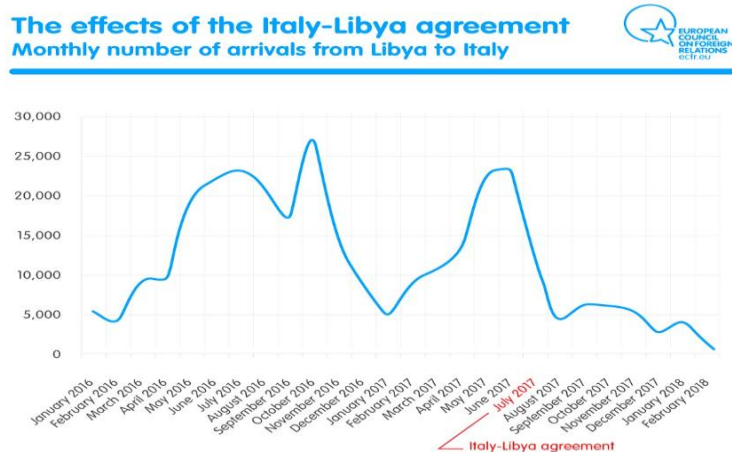
Opini publik Italia mengenai imigrasi juga memiliki peran saat memberikan pengaruh dalam mendukung terjadinya perubahan kebijakan, opini imigran mengalami tren negatif dengan

sebagian besar memiliki opini buruk terhadap kedatangan imigran, hal tersebut terlihat dari data maupun wawancara yang didapatkan dari masyarakat Italia Selatan yang berhadapan secara langsung dengan para Imigran. Riso, selaku nelayan lokal berkata kepada Al Jazeera bahwa kapal nelayan yang biasanya mengangkut ikan ke Sisilia menjadi berkurang dikarenakan dipergunakan untuk mengangkut para imigran sehingga produk ikan yang diangkut menjadi lebih sedikit dan apabila datang telat satu hari, maka produk mengalami penurunan harga sebesar 50 persen (Marsi & Di Benedetto, 2023). Pulau Lampedusa sebagai pulau paling selatan Italia sempat mengalami krisis migran dikarenakan tercatat dalam hitungan bulan jumlah imigran yang datang melebihi jumlah penduduk asli Lampedusa, mulanya penduduk Lampedusa terbuka dan mengulurkan bantuan, namun lambat laun justru kondisi kedatangan imigrasi ini mengganggu kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat lokal, bahkan beberapa warga rela berpindah demi mendapatkan kondisi kehidupan yang lebih layak (Sherlock, 2023).

Adanya faktor-faktor domestik yang saling berkesinambungan satu sama lain, mampu mendorong adanya perubahan kebijakan di bidang imigrasi Italia. menangnya koalisi partai politik sayap kanan yang berpandangan anti imigrasi ditambah dengan pemilihan birokrat terutama kementerian dalam negeri yang bersekutu dengan pemimpin partai koalisi pemerintah memudahkan untuk disahkannya peraturan baru dalam bidang imigrasi. Meskipun dari kubu kelompok kepentingan banyak yang kontra akan kebijakan pengetatan imigrasi, kelompok kepentingan mendukung pemerintah Italia untuk menciptakan regulasi yang dapat membuka kuota pekerja asing yang sesuai hukum guna mengisi kekosongan ekonomi dalam negeri. Hal serupa juga terjadi pada media-media yang meliput tentang imigrasi, dengan adanya upaya untuk meregulasi peliputan berita imigrasi yang tidak sesuai fakta, penggunaan bahasa yang negatif mampu untuk memengaruhi opini publik Italia tentang imigrasi. Publik Italia sendiri yang terdampak langsung oleh krisis imigran terutama pulau Lampedusa menjadi salah satu yang menyuarakan tentang parahnya Isu imigrasi yang harus segera ditangani oleh pemerintah Italia.

2. Faktor Internasional

Faktor internasional bisa dilihat dari beberapa hal, seperti adanya faktor hubungan bilateral yang dapat dilihat dari kerja sama antara Italia dengan negara-negara asal imigran, terutama di Afrika Utara. Italia melakukan pertemuan dengan Libya dan Tunisia untuk menyelesaikan permasalahan imigran yang terus berdatangan ke Italia. Dimulai pada tahun 2017 Italia dan Libya telah menandatangani MoU mengenai imigran. Isi dari MoU ini berupa, Italia akan memberikan bantuan dalam bentuk uang dan juga pelatihan terhadap otoritas maritim Libya dalam mencegah serta memberhentikan kapal di perairan, dan memulangkan imigran kembali ke negara asal. Isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh kedua negara tersebut ditujukan untuk mencegah datang hingga berlabuhnya imigran dari Libya ke Italia (Fiernaya, 2021).



Sumber: UNHCR

Hal ini menunjukkan hasil dari kerjasama dalam penanggulangan migran yang telah disepakati oleh kedua negara. MoU antara Italia dan Libya akan diperpanjang secara otomatis selama 3 tahun, di tanggal 2 November 2025, jika tidak ada pihak yang membatalkan ataupun merevisi sebelum tanggal tersebut (Human Right Watch, 2025).

Italia juga melakukan kerjasama dengan Tunisia dalam menanggulangi imigran ilegal yang juga bertujuan untuk mendukung negara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi yang serius. Perdana menteri Italia Giorgia Meloni melakukan kunjungan ke Tunisia bersama dengan Matteo Piantedosi, Anna Maria Bernini, dan Edmondo Cirielli. Selama kunjungan tersebut, Kais Saied Presiden Tunisia dan Meloni menyepakati perjanjian baru yang selaras dengan dengan program strategis Italia untuk benua Afrika. Kesepakatan ini mencakup paket bantuan senilai 50 juta euro untuk pengembangan proyek energi, pemberian kredit untuk usaha kecil dan menengah, serta kerjasama di bidang pendidikan antar-universitas. Selain itu, Italia juga berkomitmen seperti yang dilaporkan oleh *Agence France Presse (AFP)*, untuk menyediakan hingga 12.000 izin tinggal bagi warga Tunisia yang memiliki keahlian di sektor-sektor tertentu, sekaligus memperkuat rencana pemulangan pencari suaka yang permohonannya ditolak ke negara asal mereka (Wallis, 2024). Meloni menyatakan dalam kunjungan tersebut bahwa ia ingin memastikan Tunisia tidak berubah menjadi “titik kedatangan” bagi migran dari berbagai negara Afrika. Dalam pernyataan videonya, ia juga menegaskan rencana untuk melibatkan organisasi internasional guna mendukung proses pemulangan kembali para migran. Dalam video tersebut juga Meloni menekankan kesamaan prioritas antara Italia dan Tunisia, khususnya dalam upaya memberantas perdagangan manusia serta memulangkan imigran Afrika ke negara asal mereka (Palazzo Chigi, 2024). Kerjasama bilateral yang dilakukan dapat menjadi elemen penting dalam menyikapi imigran ilegal bagi Italia. Selain sebagai mitra ekonomi, ini akan menjadi titik yang strategis dalam pengendalian imigran ilegal yang masuk ke dalam negaranya.

Faktor regional dapat dilihat dari pengaruh aturan dan kebijakan yang berlaku di kawasan Eropa terhadap kemampuan Italia dalam menangani arus migran. Kebijakan U.E dalam menanggulangi imigran belum sepenuhnya berhasil bagi negara Italia yang menjadi pintu pertama atau pintu masuk pertama bagi para imigran yang ingin mencari suaka atau peruntungan ekonomi di Eropa. Seperti *Dublin Regulation* yang mengatur negara mana yang akan bertanggung jawab untuk memproses permohonan suaka yang masuk ke dalam wilayah U.E. Sebagai negara yang menjadi pintu masuk pertama bagi para imigran dampak dari *Dublin regulation* paling terasa bagi Italia. Akibat dari aturan ini, Italia menjadi negara yang paling bertanggung jawab atas sebagian besar permohonan suaka (EUR-Lex, 2013).

Dublin regulation yang dibuat ini menimbulkan ketegangan pada politik domestik di Italia yang menuntut pembagian beban migrasi yang lebih merata antar negara anggota U.E. Cara kerja *Dublin Regulation* mendapat kritikan karena belum bisa mengatasi imigran yang transit di negara-negara U.E termasuk Italia yang dianggap sebagai pintu masuk pertama bagi imigran. Karena kritikan tersebut dibuatlah pembaharuan melalui *Pact on migration and asylum* dengan tujuan untuk meringankan beban negara-negara U.E yang menjadi tempat kedatangan sebagian besar migran. Akan tetapi dalam prakteknya, Italia masih menghadapi bentuk tantangan yang besar seperti, kapasitas administrasi yang terbatas, dan terkait solidaritas negara U.E yang belum tentu konsisten (European Commision, 2024).

Faktor global menjadi faktor internasional selanjutnya dimana faktor ini mempengaruhi kebijakan migrasi Italia terlihat dari kondisi internasional terhadap posisi negara tersebut. Italia menempati posisi geografis strategis di Eropa selatan yang berfungsi sebagai gerbang utama migrasi dari Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia menuju benua Eropa yang dimana letak Italia ini berada di tepi laut mediterania yang menjadikannya titik transit dan titik pendaratan utama bagi ribuan migran yang mencari suaka atau peluang ekonomi di Eropa (Blanchard et al., 2024). Dalam hal ini, Italia merupakan gerbang terdepan daratan eropa, mentransfer pengungsi dan imigran yang tiba di pulau lampedusa akan di proses. Lampedusa, wilayah paling selatan Italia dalam perbatasan dan menjadi pulau terdekat dari Libya, membuat pulau ini menjadi pintu masuk yang digunakan oleh pengungsi dan imigran bersamaan dengan pulau Sisilia dan Sardinia

(Fiernaya, 2021).

Tahun	Jumlah Kedatangan
2022	96.000
2023	153.000
2024	66.000

Tabel 1.1 Perbandingan jumlah kedatangan Imigran

Sumber: *European Council On Foreign Relations*

Kedatangan mereka melalui laut dari Afrika Utara dari tahun 2022-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 tercatat dengan jumlah 96.000 orang imigran tiba di Italia. Kemudian di tahun berikutnya melonjak sekitar 153.000 di tahun 2023 (European Council On Foreign Relations, 2018). Namun pada tahun 2024, Italia mengalami penurunan kedatangan migran melalui laut, sekitar 66.000 kedatangan, penurunan 60% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2023. Selain karena kedekatan geografis yang hanya dipisahkan oleh Laut mediterania, terdapat faktor pendorong lain yang membuat orang-orang yang berasal dari afrika dan timur tengah bermigrasi ke Eropa, yaitu faktor ekonomi dan keamanan negara. Orang-orang di negara afrika seperti Nigeria dan Gambia memutuskan untuk bermigrasi ke Eropa karena kesulitan untuk mencari pekerjaan di negara asal mereka. Kebanyakan para migran yang bermigrasi merupakan imigran ilegal tanpa adanya dokumen resmi. Mereka melewati laut mediterania tengah dan barat (Nugroho & Elistania, 2019).

Keterlibatan aktor non-negara juga berperan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah Italia. Pemerintah sayap kanan Giorgia Meloni yang telah dilantik pada bulan Oktober tahun 2022, memberitahukan peraturan yang baru terkait kapal penyelamat migran pada bulan Januari 2023. Menurut dekrit pemerintah, NGO harus segera untuk memberitahu kepada otoritas Italia setelah melakukan operasi penyelamatan dan segera untuk menuju ke pelabuhan yang telah ditunjuk oleh petugas. Operasi penyelamatan yang dilakukan tidak dapat melakukan lebih dari satu kali penyelamatan pada satu waktu kecuali jika diizinkan oleh otoritas Italia. Jika terdapat kapal NGO yang ditemukan melakukan pelanggaran pada peraturan tersebut, maka kapal akan dilarang memasuki pelabuhan Italia atau mendapatkan pemblokiran selama dua bulan. Selain itu, kapten kapal akan mendapatkan denda antara 10.000 euro dan 50.000 euro dan jika terdapat kapal yang melanggar peraturan tersebut dari sekali, maka kapal akan disita oleh pihak berwenang Italia (Euro news, 2024). Hal ini dilakukan sebagai cara untuk mengurangi durasi kapal NGO berada pada zona *Search and Rescue* (SAR) dan mencegah agar mereka tidak melakukan patroli secara terus-menerus mencari kapal imigran lain setelah satu operasi telah selesai. Hal ini terjadi kepada kapal Ocean Viking yang di sewa oleh NGO SOS Mediterranee disita oleh pihak berwenang Italia karena telah melanggar aturan ketat yang telah dibuat oleh pemerintah. Kapal tersebut mendapat perintah penahanan dan denda sebesar 3.300 euro. Penahanan dan denda terjadi karena kapal telah menyimpang dari jalur yang sudah ditentukan menuju pelabuhan di Bari, kota di pantai Adriatik Italia (Euro news, 2024).

Adanya faktor-faktor internasional mampu mendorong kebijakan Italia di bidang imigrasi. Letak geografis Italia yang menjadikannya titik kedatangan utama bagi migran, sehingga dinamika global turut membentuk respons kebijakan nasional. Pada tingkat regional, mekanisme yang diterapkan oleh U.E untuk meringankan Italia dalam menerima imigran yang masuk ke dalam negara. Pemerintah Italia juga memperkuat kerja sama bilateral dengan Libya dan Tunisia dalam pengendalian migran. Disisi lain, regulasi yang lebih ketat terhadap operasi kapal penyelamat oleh NGO. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sekuritisasi isu migrasi dan upaya pemerintah untuk mengontrol arus kedatangan migran.

3. Windows of Opportunity

Melalui teori *windows of opportunity*, adanya peluang menekankan aktor dalam mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri negaranya melalui faktor domestik dan faktor

internasional. Dari adanya faktor-faktor ini kemudian dijadikan oleh Giorgia Meloni yang merupakan pengambil keputusan sebagai sebuah jendela kesempatan dalam merubah kebijakan imigrasi di Italia. *Cutro Decree* merupakan salah satu contoh dari kebijakan imigrasi baru yang dikeluarkan oleh Italia pada Mei tahun 2023 yang menjelaskan perlindungan khusus terhadap migran yang masuk ke dalam Italia yang tidak memenuhi syarat. *Cutro Decree* sendiri dibuat atas adanya korban kapal karam yang kemudian momentum ini dimanfaatkan oleh Meloni dalam memperketat kebijakan imigran Italia dengan membatasi masuknya imigran ke Italia agar selama prosesnya tidak menimbulkan korban lagi. Selain itu, isu imigran ini juga dimanfaatkan oleh Meloni untuk meningkatkan kerjasama Italia dengan negara lain, seperti kerjasama Italia dengan Tunisia dalam menangani imigran pada tahun 2023.

Melalui faktor domestik, ada beberapa faktor yang sebelumnya telah dijelaskan yang dapat menjelaskan jendela peluang yang dapat diambil oleh Giorgia Meloni sebagai pengambil keputusan dalam kasus perubahan kebijakan imigrasi Italia dimana birokrasi Italia yang bertugas untuk mengurus imigran yang bermunculan di Italia, seperti adanya Matteo Piantedosi sebagai Menteri dalam Negeri Italia dan kemudian muncul *Piantedosi Decree* yang mengatur pengangkutan imigran yang datang menggunakan kapal NGO yang disahkan pada tahun 2023 dan kemudian diperbaharui pada *Cutro Decree* setelah terjadinya peristiwa kapal tenggelam di perairan Cutro. Dukungan partai politik dalam menekan kebijakan imigran di Italia yang juga yang mengusung Meloni, yaitu partai *Fratelli D' Italia* yang dapat menciptakan politik domestik di Italia yang lebih stabil, khususnya dalam konteks kebijakan imigrasi. Kemudian kelompok kepentingan melihat adanya perubahan yang bisa dilakukan pemerintah dengan menekan peraturan pekerja imigran yang lebih luas dan legal untuk mengisi kekurangan pekerja. Adanya respon negatif dari masyarakat Italia yang bisa dilihat dari opini publik, yang bisa dilihat melalui media massa juga berpengaruh terhadap perubahan kebijakan imigran Italia khususnya setelah peristiwa karamnya kapal yang berisi imigran di perairan Cutro yang menjadi pertimbangan *Cutro Decree*. Melalui adanya *Cutro Decree* ini juga diharapkan bisa merespon pertimbangan faktor kondisi domestik dari Italia, untuk memperketat masuknya imigran ilegal namun juga mempertimbangkan dorongan kelompok kepentingan untuk menambah kuota imigran yang masuk ke Italia secara legal.

Kemudian dari faktor internasional jendela peluang juga terjadi melalui beberapa hal seperti faktor global yang bisa dilihat dari lonjakan imigran dari Afrika Utara, Timur Tengah dan Asia. Disini Italia merupakan gerbang utama di jalur darat untuk para imigran ini yang membuat banyaknya imigran yang masuk ke Italia. Kurang efektifnya kebijakan Uni Eropa di kawasan regional seperti adanya *Dublin Regulation* juga menjadi jendela peluang bagi Giorgia Meloni dalam merubah kebijakan Imigrasi Italia. Karamnya kapal di perairan Cutro juga menjadi peristiwa yang dijadikan jendela peluang utama oleh Meloni untuk bisa memperketat kebijakan imigrasinya. Faktor bilateral juga pada akhirnya menjadi jendela peluang bagi Meloni dalam memperketat kebijakan imigran Italia dimana terdapat kerjasama bilateral antara Italia dengan beberapa negara seperti dengan Tunisia. Pada Februari 2023 terjadi tragedi kapal karam di perairan Cutro, Calabria. Sebuah kapal yang berangkat dari Libya dengan membawa sekitar 500 orang di kapal tersebut dan tenggelam berjarak kurang dari satu kilometer di lepas pantai lampedusa Italia, dengan menewaskan sebanyak 368 orang (Oberti, 2023).

Peristiwa yang terjadi bukan hanya tragedi kemanusiaan, melainkan juga peristiwa yang dapat dimanfaatkan oleh Meloni untuk mempertegas dan memperkuat legitimasinya terhadap kebijakan yang lebih ketat dalam mengendalikan arus imigran ke Italia. Terjadinya tragedi tersebut membuat Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni membuat dan mengesahkan "*Cutro Decree*" atau dekrit cutro yang membatasi perlindungan khusus terhadap migran yang masuk ke dalam Italia yang tidak memenuhi syarat (Dumont, 2024). Adanya kapal yang melakukan operasi penyelamatan terhadap kapal yang penyelamat migran juga menjadi alasan diambilnya *Cutro Decree*. Adanya keterlibatan aktor non-negara yaitu adanya operasi penyelamatan yang dilakukan kapal-kapal NGO juga membuat Pemerintah Meloni menilai operasi ini menjadi sesuatu yang dapat menimbulkan lebih banyak potensi korban imigran dari wilayah Afrika ke



Italia. Selain itu, kebijakan yang dibuat ini untuk menegaskan kedaulatan negara dalam mengatur perbatasan dan memastikan bahwa pengelolaan migrasi tetap berada pada bawah otoritas pemerintah, bukan aktor non-negara (AP News, 2024). Dengan demikian, jendela peluang bagi Giorgia Meloni terbentuk melalui adanya tekanan domestik dan faktor internasional seperti adanya peningkatan arus migrasi, kurang bekerjanya mekanisme Uni Eropa dalam menangani imigran dan peristiwa lain yang menyebabkan krisis kemanusiaan hingga menyebabkan korban seperti karamnya kapal imigran di perairan Cutro.

SIMPULAN DAN SARAN

Pengetatan kebijakan imigrasi Italia pada periode 2022-2024 di bawah kepemimpinan Giorgia Meloni merupakan hasil dari terbukanya *window of opportunity* yang terbentuk dari adanya faktor domestik dan internasional. Dukungan dari partai politik yang berkuasa, menguatnya sentimen negatif opini publik terkait naiknya jumlah imigran yang datang, peran media dalam membingkai krisis migrasi, serta tekanan kelompok kepentingan menciptakan legitimasi domestik bagi perubahan kebijakan. Sementara itu, pada faktor internasional lonjakan arus migrasi, keterbatasan mekanisme Uni Eropa seperti *Dublin Regulation*, serta terjadinya peristiwa kapal karam di cutro yang memperkuat urgensi kebijakan yang lebih bersifat membatasi. Melalui kondisi tersebut, pemerintah Italia memanfaatkan krisis sebagai momentum politik untuk memperketat pengendalian migrasi melalui kebijakan seperti *Decreto Cutro* dan perluasan kerjasama bilateral dengan negara transit. Namun demikian, kebijakan ini bersifat bertentangan. Meskipun kebijakan yang dibuat ini efektif dalam menekan arus migran, kebijakan tersebut juga menimbulkan persoalan yang serius terkait perlindungan hak asasi manusia serta komitmen Italia terhadap norma hukum internasional dan Uni Eropa.

DAFTAR PUSTAKA

- AFP. (2025, July 1). Italy boosts legal work visas, as union says policy falls short. *Arab News*. <https://www.arabnews.com/node/2606551/amp>
- Amante, A., Armellini, A., & Weir, K. (2025, June 30). Italy to issue half million non-EU work visas over next three years. *Reuters*. <https://www.reuters.com/world/italy-issue-half-million-non-eu-work-visas-over-next-three-years-2025-06-30/>
- ANSA. (2023, June 13). Meloni-EU forge first agreement but Saied raises stakes. *InfoMigrants*. <https://www.infomigrants.net/en/post/49622/melonieu-forge-first-agreement-but-saied-raises-stakes>
- ANSA. (2024, 12 20). Media use alarmist language about migration. *Italy's media giving less coverage to migration issues*. <https://www.infomigrants.net/en/post/61854/italys-media-giving-less-coverage-to-migration-issues>
- ANSA & InfoMigrants. (2022, 10 25). Matteo Piantedosi is the new interior minister of Italy. He considers 'governing migration' a priority. New Italian interior minister says 'governing migration' priority. <https://www.infomigrants.net/fr/post/44236/new-italian-interior-minister-says-governing-migration-priority>
- AP News. (2024, January 7). Italy's regulations on charities keep migrant rescue ships from the Mediterranean. *Italy migration rescue ships meloni*. <https://apnews.com/article/italy-migration-rescue-ships-meloni-52d3137cb7a88aff6c169d52d1ea830e>
- Armellini, A., Semeraro, G., & Harvey, J. (2025, June 20). Italy's immigration and emigration both soaring, stats agency says. *Reuters*. <https://www.reuters.com/world/italys-immigration-emigration-both-soaring-stats-agency-says-2025-06-20/>
- Autin, A. (2023, May 12). 'Emergency' law reflects an ineffective, inhumane response. Disastrous Clamp Down on Migrants Rights in Italy. <https://www.hrw.org/news/2023/05/12/disastrous-clamp-down-migrants-rights-italy>
- Blanchard, A., Gaole, C., Hatabi, J., Macculi, A., & Trame, A. (2024, January 10). Navigating the Complexities of Italian Migration Policies: Assessing Measures, Agreements, and



- Humanitarian Implications. *Analysing the Maiden Year: An overview of the Foreign Policy of Giorgia Meloni's Government*. <https://www.itssverona.it/analysing-the-maiden-year-an-overview-of-the-foreign-policy-of-giorgia-melonis-government>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Dumont, J. (2024, 10 24). Toughening legislation. *Two years of anti-immigrant policy in Giorgia Meloni's Italy*. <https://www.infomigrants.net/en/post/60758/two-years-of-antiimmigrant-policy-in-giorgia-melonis-italy>
- Dumont, J. (2024, October 24). Two years of anti-immigrant policy in Giorgia Meloni's Italy. *InfoMigrants*. <https://www.infomigrants.net/en/post/60758/two-years-of-antiimmigrant-policy-in-giorgia-melonis-italy>
- Elia, L., Ferraresi, M., & Bove, V. (2019, August 25). *Immigration, fear, and public spending on security: The Italian example*. VoxEU CEPR. <https://cepr.org/voxeu/columns/immigration-fear-and-public-spending-security-italian-example>
- EUR-Lex. (2013, 6 26). *REGULATION (EU) No 604/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 June 2013*. Official Journal of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:en:PDF>
- Euro news. (2024, January 17). *Italy's strict rules against NGO rescue ships is keeping them from saving migrants at sea*. <https://www.euronews.com/2024/01/17/italys-strict-rules-against-ngo-rescue-ships-is-keeping-them-from-saving-migrants-at-sea>
- European Commision. (2024, April 30). *the implementation of the Pact on Migration and Asylum*. EU Pact on Migration and Asylum: reinforced rules to tackle migration challenges. https://home-affairs.ec.europa.eu/news/eu-pact-migration-and-asylum-reinforced-rules-tackle-migration-challenges-2024-04-30_en?utm
- European Commision. (2025, April 1). *Italy - Migration and Home Affairs - European Commission*. Migration and Home Affairs. Retrieved November 3, 2025, from https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/eu-immigration-portal/who-does-what/italy_en?prefLang=bg
- European Council. (2024, May 14). *Work on the asylum and migration pact*. Migration and asylum pact. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-migration-asylum-reform-pact/>
- European Council. (2024, June 23). *How the Council coordinates the EU response to crises*. Consilium.europa.eu. Retrieved October 6, 2025, from <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/ipcr-response-to-crises/#ipcr>
- European Council On Foreign Relations. (2018, April 17). *Migration through the Mediterranean: Mapping the EU response*. https://ecfr.eu/special/mapping_migration/
- Europol. (2025). *Migrant smuggling*. Europol. <https://www.europol.europa.eu/crime-areas/migrant-smuggling>
- Fiernaya, M. (2021). KEBIJAKAN PEMERINTAH ITALIA TERHADAP IMIGRAN. *JOM FISIP*, 8, 1-12.
- Fiernaya, M. (2021, Juni). KEBIJAKAN PEMERINTAH ITALIA TERHADAP IMIGRAN. *KEBIJAKAN PEMERINTAH ITALIA TERHADAP IMIGRAN*, 8(1), 1-12.
- Giannetto, L., Guidi, C. F., & Procter, C. (2024, August 1). *Made in Italy: is excellence without exploitation possible?* Migration Policy Centre. Retrieved November 27, 2025, from <https://migrationpolicycentre.eu/made-in-italy-is-excellence-without-exploitation-possible/>
- Hoque, N. (2024, August 21). Migration Dynamics and the Agricultural Sector. *Trapped by Italy's Policy Paradox, Asylum Seekers and Other Migrants Can Fall into Exploitative Farm Labor*. <https://www.migrationpolicy.org/article/italy-migrant-farmworker-exploitation>
- Human Right Watch. (2025, October 13). *People Returned by Libyan Coast Guard Subject to Severe Abuse. Italy: End Border Control Pact with Libya*. <https://www.hrw.org/news/2025/10/13/italy-end-border-control-pact-with-libya>



- Kirby, P. (2022, September 26). Giorgia Meloni: Italy's far-right wins election and vows to govern for all. *BBC*. <https://www.bbc.com/news/world-europe-63029909>
- Langham, A. (2023, 02 23). *COALITION DECLARATION AND SPLIT-TICKET VOTING ELIMINATION*. How the Far-Right Won in Italy: A Story of Coalitions and Electoral Law. <https://www.electoralintegrityproject.com/eip-blog/2023/2/23/how-the-far-right-won-in-italy-a-story-of-coalitions-and-electoral-law>
- Marino, A. (2025). Italy Setting Trends in the European Radical Right: The Success of Fratelli d'Italia. *National Center of Competence in Research – The Migration-Mobility Nexus*. https://docs.google.com/document/d/1I53T8D8ptW5kCXOUAqFL6_aoiJAGXvIBjYPJwP5K3Rk/edit?tab=t.0
- Marsi, F., & Di Benedetto, G. (2023, October 20). Italy's Lampedusa caught between solidarity and survival as migration rises | Migration News. *Al Jazeera*. <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/20/italys-lampedusa-caught-between-solidarity-and-survival-as-migration-rises>
- Masera, A. (2017). How does the media on both sides of the Mediterranean report on migration? *The Temperature is Down, but Media Coverage still Fails to Tell the full Migration Story*, 47-51. <https://ethicaljournalismnetwork.org/media-mediterranean-migration-italy>
- Ministero Dell'Interno. (2010). *The Integration Agreement*. piemonteimmigrazione. <https://www.piemonteimmigrazione.it/losapeviche/en/lets-talk-about-it/258-l-accordo-di-integrazione-2#:~:text=The%20Integration%20Agreement%20is%20an,their%20children%20in%20Italian%20schools.>
- Nugroho, M. D., & Elistania, E. (2019, 9 20). Implementasi Kebijakan Italia dalam Menanggulangi Krisis Imigran Ilegal yang Melewati Laut Mediterania Tengah Pada Periode 2016-2018. *Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy*, 3(2), 116-123. <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/view/206>
- Oberti, C. (2023, 03 03). The shipwreck off the Calabrian coast of Italy on February 26 was one of the worst of the decade. Many say Italy's strict immigration policy is to blame. *Shipwreck in Italy: 'The last tragedy of this kind dates back to 2013'*. <https://www.infomigrants.net/en/post/47200/shipwreck-in-italy-the-last-tragedy-of-this-kind-dates-back-to-2013>
- Palazzo Chigi. (2024, April 17). *Visita in Tunisia, le dichiarazioni alla stampa del Presidente Meloni*. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=9l4lckq6Qew>
- Reuters. (2023, December 6). *Italy's Meloni talks tough on migrants while opening up to foreign workers*. Middle East Monitor. <https://www.middleeastmonitor.com/20231206-italys-meloni-talks-tough-on-migrants-while-opening-up-to-foreign-workers/>
- Sherlock, R. (2023, September 28). Italy's Lampedusa island struggles with migration crisis. *NPR*. <https://www.npr.org/2023/09/28/1201785102/lampedusa-italy-migrant-crisis-meloni>
- Sinaga, D. E. S. (2025, July). Posisi Italia terhadap Kebijakan Uni Eropa. *Hubungan Italia dengan Uni Eropa di Bawah Kepemimpinan Giorgia Meloni*, 4, 1136-1138. <https://greenpub.org/JIM/article/view/1157>
- Skenderoglou, G. (2023, 11 25). *Piantedosi Decree: the price of disregard for maritime law*. Consequences of the Piantedosi Decree. <https://www.sosmediterranee.org/consequence-of-the-piantedosi-decree/>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA, CV. https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf
- Wallis, E. (2024, April 18). Italy's Meloni talks migration in Tunisia. *Info Migrants*. <https://www.infomigrants.net/en/post/56538/italys-meloni-talks-migration-in-tunisia>
- Wallis, E. (2024, December 27). Italy: A year of bold policies to curb irregular immigration. *InfoMigrants*. <https://www.infomigrants.net/en/post/61763/italy-a-year-of-bold-policies-to-curb-irregular-immigration>